

Rakyat Di Atas Segalanya

PENANGGUNG JAWAB

Erwin Razak, S.IP

REDAKSI

Syamsudin, S.Pd, MA
AT. Erik Triadi, S.IP

ALAMAT REDAKSI

Jl. Cendrawasih No. 2
Mejing Lor - Desa Ambarketawang
Kecamatan Gamping
Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp : 0274-9543879
e-mail : sekret@rumahsuluh.org
website : rumahsuluh.org

Belakangan ini, kita kembali disodori suatu pernyataan lama, yang kebenarannya tidak diragukan, bahwa di lapangan demokrasi: rakyat di atas segalanya. Soal kita tentu bukan kualitas kebenaran dari pernyataan tersebut. Namun kepada pertanyaan mengapa pernyataan tersebut kembali muncul? Apakah ini penanda bahwa demokrasi kita sedang menghadapi tantangan, atau telah muncul gejala gerak mundur dari demokrasi?

Bagi mereka yang mengikuti dinamika politik (hukum) kontemporer, tentu saja maklum, bahwa sesuatu sedang terjadi. Pangkal soalnya adalah perkara keputusan politik yang harus diambil oleh pejabat publik. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pejabat publik boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak rakyat? Apakah pejabat publik telah mendapatkan hak penuh untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu tindakan, sesuai dengan apa yang dipandanginya benar, kendati

hal tersebut bertentangan dengan suara rakyat?

Di masa lalu, kita pernah mengalami suatu periode dimana penguasa bertindak subyektif, atau bertindak tanpa pertimbangan suara rakyat.

Mari beragama untuk memuliakan sesama manusia, bukan meninggikan diri sendiri, apalagi saling merendahkan sesama manusia
(Lukman Hakim Saifuddin)

Kendati pemilu diselenggarakan secara rutin, namun pemilu tidak lebih sebagai sarana pemberi legitimasi, dan dalam batas tertentu sebagai sarana untuk memperbaiki loyalitas masyarakat, dan tentu untuk memperbaiki tim – oleh sebab setiap periode membutuhkan kemampuan yang berbeda.

Terhadap rejim yang demikian, public tidak dapat mengharapkan keadaan dimana penguasa mendengar warga. Keadaan inilah yang dikoreksi oleh reformasi.

Yang dengannya diharapkan keadaan berubah, dan kembali kepada suatu tata aturan bahwa rakyat adalah pihak pemilik kedaulatan.

Dengan optik demokrasi, maka segala tindak tanduk kekuasaan haruslah mengikuti garis kepentingan rakyat. Pemilu bukan peristiwa yang dapat dijadikan dasar pembenar untuk bertindak melawan suara rakyat. Memang rakyat telah memberikan mandate, baik kepada pejabat publik, maupun kepada partai sebagai

kekuatan politik. Namun, mandat dimaksud adalah suatu legitimasi untuk tindakan-tindakan konstruktif, sesuai dengan cita-cita bangsa. Artinya, ketika mereka yang memegang mandat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka sangat



wajar jika rakyat menolak.

Para pemimpin dan atau pejabat publik hendaknya menyadari sepenuhnya bahwa keberadaannya representasi rakyat. Maka ketika pernyataan rakyat di atas segalanya, kita mengerti bahwa pernyataan tersebut merupakan peringatan kepada mereka yang merasa berada di atas hukum dan berada di atas rakyat.

Pelatihan Implementasi Jurnalisme Desa

Dari Pelatihan Jurnalisme Desa di Universitas Janabdra Yogyakarta, Sabtu (17/01), muncul beberapa tantangan permasalahan sekaligus peluang. Peserta pelatihan mengutarakan pentingnya peta keadaan arus informasi di desa yang sebetulnya menjadi tolak ukur sistim informasi desa dan kawasan yang akan dikembangkan.

komunikasi yang dinamis. “dalam hal ini pemdes sebenarnya punya keinginan apa dalam distribusi informasi, dan masyarakat bagaimana dan undang-undang arahnya kemana”, ungkap Bambang dari, Desa Genjahan, Ponjong Gunung Kidul.

Di dalam pelatihan, muncul juga permasalahan yang disampaikan peserta. Keberadaan portal desa dalam

ha ini web desa, belum menjadi sumber informasi yang dapat diakses publik. Beberapa kendala infrastruktur dan lemahnya SDM dalam penyediaan data dan informasi menjadi tantangan bersama. Padahal banyak peristiwa penting di desa yang memiliki bobot informasi yang menarik. Sebagai contoh, di Desa Panggungharjo saja terdapat 10 acara budaya yang sebenarnya memiliki bobot berita. Tapi sayang

tidak dipublikasikan secara luas. Baik oleh web desa maupun oleh media mainstream.

Namun demikian, sudah beberapa desa yang mengembangkan sistem informasi desa dan kawasan. Pada awalnya atas fasilitasi pemerintah kabupaten dan kemudian portal desa

Arus informasi yang dimaksud adalah proses penyampaian data dan informasi, serta respon balik secara positif dan berkelanjutan, baik dari sumber informasi dan dari audien yang menerima informasi. Jadi antara sumber informasi dan penerima informasi idealnya harus terjadi



di kelola sendiri oleh pemerintah desa untuk pengembangan. Di Kabupaten Bantul, portal desa telah menggunakan domain desa.id. walaupun masih seolah “menumpang” dengan domain bantul.gov.id .

Untuk menjawab permasalahan dan memperkuat implementasi Jurnalisme Desa, sangat relevan dalam pelatihan Jurnalisme Desa, instruktur pelatihan dari Surat Kabar Harian Harjo, menyampaikan teknik menulis berita dan juga cara membuat rilis. Sebagai usaha untuk meningkatkan kapasitas desa untuk memproduksi pemberitaan. Baik dalam bentuk penyampaian data serta informasi kepada publik. Apalagi syarat dari terpublikasinya suatu peristiwa adalah tersedianya narasi berita yang memang sengaja disiapkan oleh sumber berita. “Dalam hal ini sebuah berita bisa disiapkan pemerintah desa ataupun penggiat komunitas di desa. Kemudian diupload ke web desa ataupun dipersiapkan sebagai sebuah rilis berita. Selanjutnya rilis berita yang telah siap dikirimkan kepada redaksi media mainstream, baik media cetak maupun elektronik”, jelas Bhekti Suryani, wartawan dari Harian Harjo.

Pelatihan Jurnalisme Desa I dengan tema “Pengembangan dan Implementasi Jurnalisme Desa” dibuka

oleh Dr. Ir Suharjanto, MSCE selaku Rektor Universitas Janabadra. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Universitas Janabadra, Rumah Suluh, Forum Desa Digital, Harian Harjo, dan rumahsuluh.org. Pelatihan ini dihadiri oleh 35 orang peserta undangan yang berasal dari pemerintahan desa, penggiat media desa, serta akademisi dari Kabupaten se Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.



Pada sesir terakhir, Erwin Razak dari rumah suluh menyampaikan bahwa paska pelatihan peserta akan didampingi oleh Forum Desa Digital dan otomatis peserta yang mengikuti pelatihan menjadi bagian dari Ikatan Reporter Desa. Sebuah organisasi yang menjadi wadahnya jurnalis warga di desa untuk mengembangkan sistem informasi desa dan kawasan yang responsif menjawab masalah warga desa.